

Abstrak

Memiliki kebijakan tanggungjawab Konstitusional kepada negara yang dilandaskan peraturan hukum realitanya menimbulkan pro dan kontra karena akan memberikan dua persepsi kepada korporasi BUMN yaitu CSR sebagai kewajiban atau kebutuhan. Adanya dua persepsi ini akan mempengaruhi korporasi dalam melaksanakan aktivitas CSR. Sehingga, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena untuk mengetahui Kebijakan Tanggungjawab Konstitusional bahwa korporasi BUMN seperti PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara dalam salah satu program unggulan PLN Peduli Objek Wisata Silahisabungan apakah sekedar dimandatkan oleh UU atau bahkan atas dasar moral atau etik karena ada dorongan komitmen sukarela yang dilakukan oleh korporasi dalam memilih dan mengimplementasikan praktik-praktik CSR/PKBL. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tanggungjawab konsitusional dan implementasi etika bisnis di PT PLN UIW Sumatera Utara melalui salah satu program unggulannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni studi kasus pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara sebagai perusahaan BUMN dari program PLN Peduli Objek Wisata Silahisabungan merupakan sebuah implementasi etika bisnis yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagai BUMN sesuai peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007. Tidak sekedar memenuhi kewajiban tapi PLN UIW Sumatera Utara melalui program unggulannya tersebut berdasarkan analisis menunjukan bahwa tanggungjawab sosial yang mereka lakukan sekaligus sebagai kebutuhan keberlanjutan bisnis. Kewajiban dan kebutuhan yang berjalan beriringan dalam tanggungjawab sosial mengantarkan pada keberhasilan mencapai tujuan konstitusional dalam skala kecil bagi PLN UIW Sumatera Utara. Meningkatnya taraf perekonomian, meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum fasilitas sosial, kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat Silalahi yang ikut meningkat sesuai dengan tujuan konstitusi Negara yang tertuang pada pembukaan amandemen UUD 1945. .

Kata kunci : Kebijakan, BUMN, *Corporate Social Responsibility*

Abstract

Having a policy of constitutional responsibility to the state which is based on real-life legal regulations raises the pros and cons because it will give two perceptions to BUMN corporations about CSR as an obligation or as a need. With these two perceptions will affect the corporation to carrying out CSR activities. This research way important because have purpose to know the Constitutional Responsibility Policy that BUMN corporations such as PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara in one of their main program PLN Peduli Objek Wisata Silahisabungan, whether they are merely mandated by Constitution or even on moral basis or ethical basis because there is encouragement voluntary commitment made by corporations in selecting and implementing CSR / PKBL practices. This study explains how the constitutional responsibility and implementation of business ethics at PT PLN UIW Sumatera Utara through one of its main programs. The research method used qualitative case study approach. The results is indicate that the corporate social responsibility undertaken by PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara as a state-owned company from the PLN Peduli Objek Wisata Silahisabungan is a implementation of business ethics carried out to obligations as a BUMN in accordance with Constitution number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas and Ministerial BUMN Regulation No. Per-05 / MBU / 2007. Not only fulfilling obligations, PLN UIW Sumatera Utara through its main program based on the analysis shows that the social responsibility they carry out as well as business sustainability needs. Obligations and needs that in line with social responsibility lead to the success of achieving constitutional goals on a small scale for PLN UIW Sumatera Utara Increasing the economic level, increasing the quality and quantity of public facilities, social and health facilities and the education quality in Silalahi, which also increased according to the objectives of the State constitution as set forth in the opening of the UUD 1945.

Keywords: Policy, BUMN, Corporate Social Responsibility